

ABSTRAK

M. Satria Effendy: *Dualisme Hukum Perceraian di Bawah Tangan pada Masyarakat Kabupaten Banjar (Analisis Hierarki Norma Hukum dan Maqāshid al-Syarī'ah)*. Tesis, Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI, Pembimbing II: Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M. Ag. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Tahun 2025

Kata Kunci: Perceraian di bawah tangan, Hierarki norma hukum, *Maqāshid al-Syarī'ah*, Kabupaten Banjar.

Fenomena perceraian di bawah tangan yang masih marak terjadi di masyarakat Kabupaten Banjar mencerminkan adanya dualisme hukum antara norma formal negara dan norma informal keagamaan. Praktik talak tanpa pengesahan pengadilan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun tetap dianggap sah oleh sebagian masyarakat berdasarkan fikih klasik dan ajaran ulama lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) dinamika hukum formal dan informal dalam praktik perceraian di bawah tangan, serta (2) bagaimana dualisme hukum tersebut ditinjau dari teori hierarki norma hukum dan *maqāshid al-syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum tertulis dan studi atas implementasinya dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah sistem hukum formal terkait perceraian, serta pendekatan konseptual, guna mengkaji teori hukum seperti hierarki norma hukum dan *maqāshid al-syarī'ah*. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan pada ketidaksesuaian antara norma hukum formal dan praktik sosial-keagamaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, dalam praktik sosial masyarakat Kabupaten Banjar, perceraian di bawah tangan terjadi karena dominasi pandangan keagamaan lokal, rendahnya kesadaran terhadap fungsi hukum formal, serta kuatnya pengaruh tokoh agama. Talak lisan dianggap telah cukup untuk memutuskan pernikahan tanpa memerlukan pencatatan hukum. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan status hukum istri, kesulitan administratif, serta kerentanan hak-hak anak dan perempuan. *Kedua*, dalam analisis teori hierarki norma, perceraian di bawah tangan menunjukkan pelanggaran terhadap keteraturan sistem hukum nasional karena praktik ini berjalan di luar prosedur hukum yang sah. Sedangkan dari perspektif *maqāshid al-syarī'ah*, perceraian yang tidak tercatat secara formal tidak mampu menjamin perlindungan terhadap tujuan utama syariat, seperti menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), harta (*hifẓ al-māl*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), dan agama (*hifẓ al-dīn*). Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang memadukan antara legalitas formal dengan nilai-nilai keagamaan lokal melalui edukasi hukum, rekonstruksi regulasi, dan pembentukan mekanisme legalisasi talak lisan yang adaptif terhadap konteks sosial masyarakat.